



Bandung, 14 Maret 2023

ARAH KEBIJAKAN POKOK PIKIRAN, BANTUAN KEUANGAN, HIBAH, BANTUAN SOSIAL TA 2024

PADA ACARA SOSIALISASI SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PADA
PENDAMPING DPRD TAHUN 2023

Dr. IENDRA SOFYAN, ST., MSi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat

#JABAR JUARA



01 RANCANGAN RKPD TA 2024



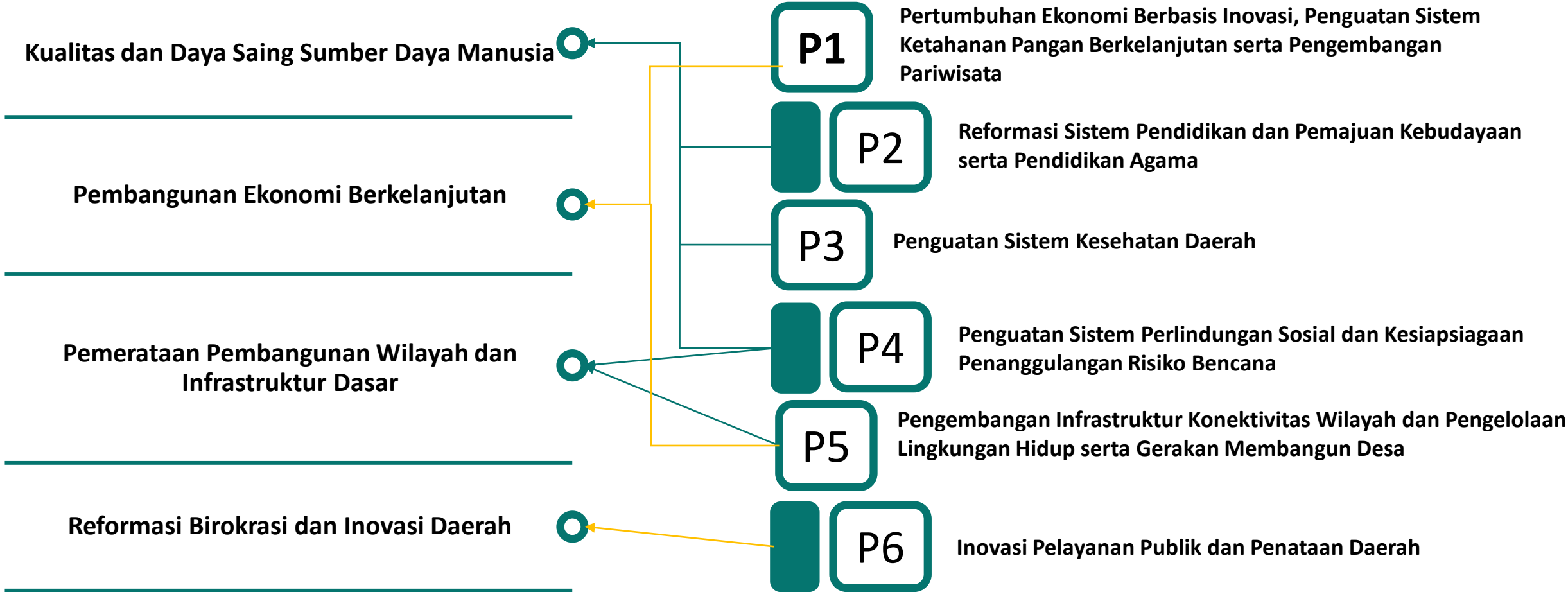
PRIORITAS PEMBANGUNAN RPOVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2024



ISU STRATEGIS

PRIORITAS PEMBANGUNAN





ARAHAN KEGIATAN TAHUN 2024

1

Penormalan Ekonomi;

2

Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, Rehabilitasi
Proyek Strategis;

3

Keberlanjutan **Program Jabar Juara**;

4

Pemenuhan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**.

5

Reformasi Birokrasi

6

Penyelesaian Program Strategis (Kemiskinan,
Stunting, Perpres 87/2021)



KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DAN HIBAH TAHUN 2024

**Pencapaian target indikator makro
Kabupaten/Kota** yang menunjang
pencapaian target indikator makro
provinsi;



**Pemulihan dan Pemantapan Ekonomi
Jawa Barat** setelah Masa Pandemi Covid-
19;



Penyelesaian Isu-Isu Komprehensif
seperti Kemiskinan dan Stunting ;



**Penyelesaian Isu Strategis dan Isu
Kewilayahan.**



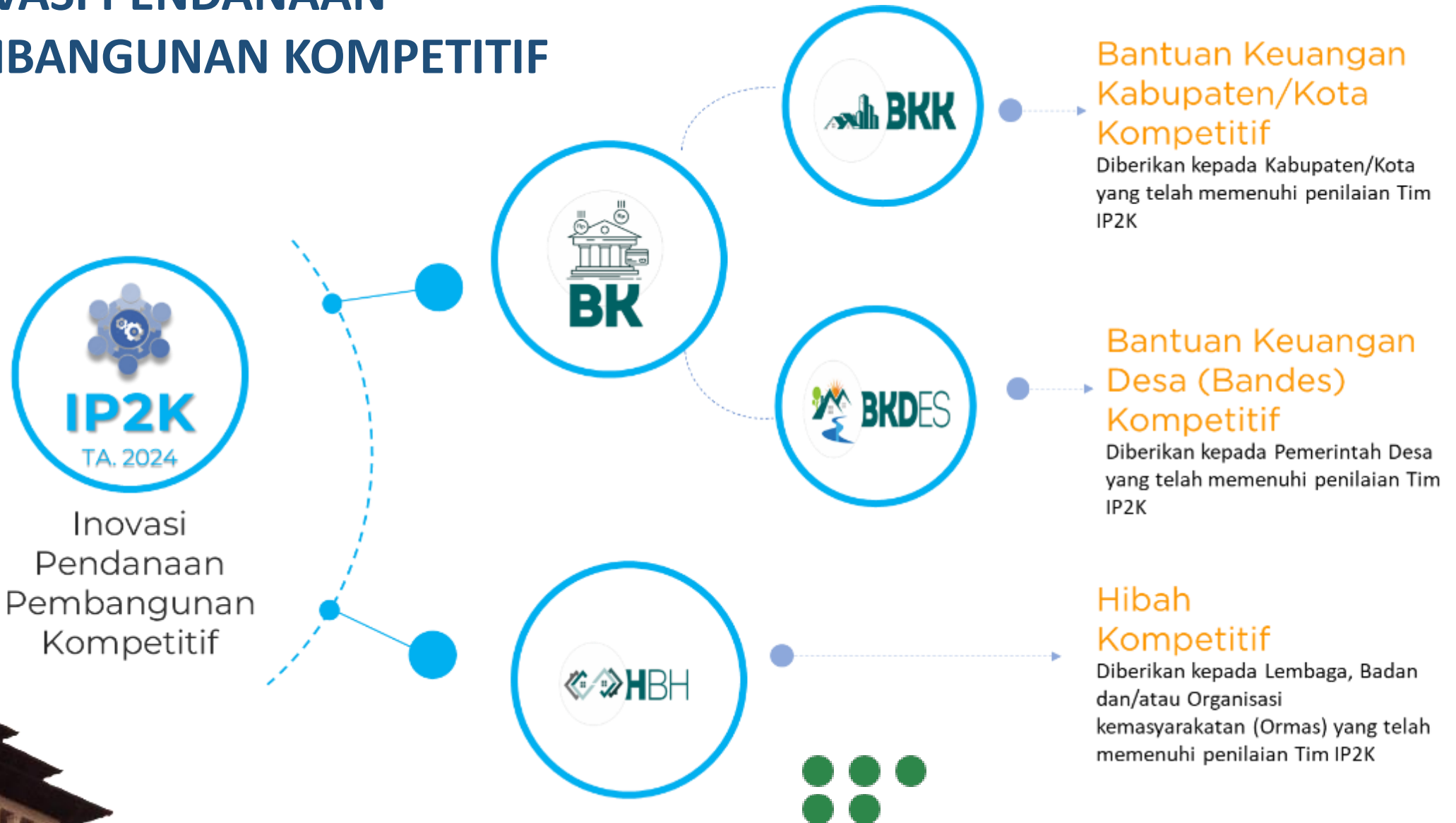
Skema Pendanaan :

1. Pendanaan Pembangunan Kompetitif

2. Pendanaan Pembangunan Non-Kompetitif (Reguler) Sesuai Pergub No. 13 dan 14 Tahun 2021;



INOVASI PENDANAAN PEMBANGUNAN KOMPETITIF





SIPD JABAR UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2024





APLIKASI SIPD SAAT INI



SIPD Kemendagri

(<https://sipd.kemendagri.go.id/>)

1. SIPD dikeluarkan oleh Pusdatin,
2. Digunakan untuk pengusulan tahun 2021-2023
3. Saat ini masih digunakan untuk penatausahaan



SIPD-RI

(<https://sipd.-ri.kemendagri.go.id/>)

1. SIPD-RI dikeluarkan oleh Pusdatin.
2. Digunakan untuk pengusulan tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya (SE Kemendagri)



SIPD Bangsa

(<https://sipd.go.id/>)

1. SIPD Bangsa dikeluarkan oleh Ditjen Bangsa Kemendagri.
2. Tidak terdapat dasar hukum.
3. Memiliki proses bisnis yang berbeda.



SIPD YANG DIGUNAKAN PEMPROV JABAR TA 2024



SIPD Kemendagri

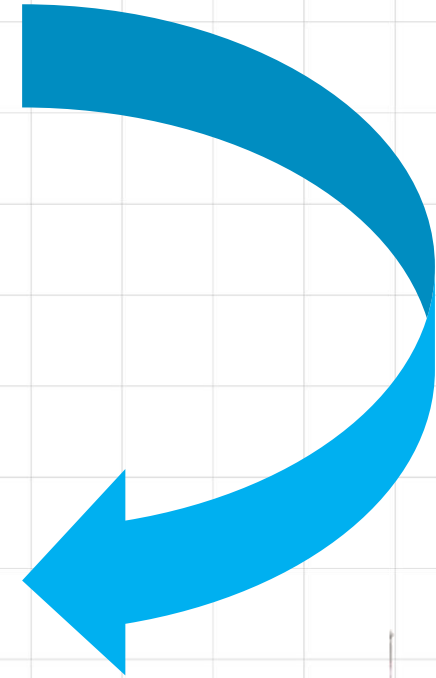
[\(https://sipd.kemendagri.go.id/\)](https://sipd.kemendagri.go.id/)



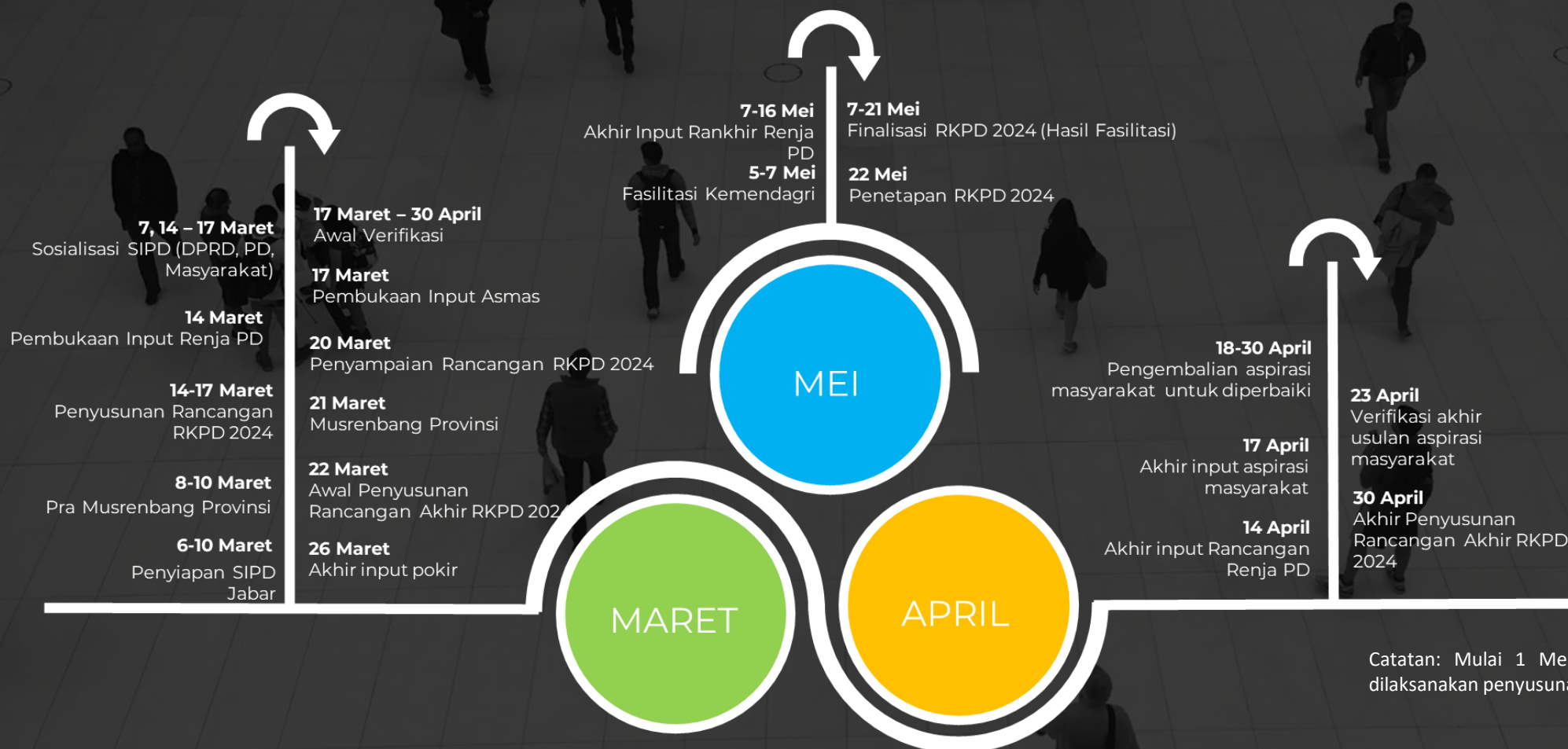
SIPD Jabar

Domain : sipd.jabarprov.go.id

- Akun (User dan Password) sama dengan sipd kemendagri 2022



TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2024



PENYAMPAIAN POKOK POKOK PIKIRAN DPRD





ATURAN PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN



PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017 PASAL 78



Ayat (1)

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 mencakup :

a.

i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;



Ayat (2)

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran & pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses /penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan & kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang RPJMD



Ayat (3)

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD, disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda



Ayat (1)

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses



Ayat (2)

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran



Ayat (3)

Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah



Ayat (4)

Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD

PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017 PASAL 178



Ayat (5)

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan



Ayat (6)

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD



Ayat (7)

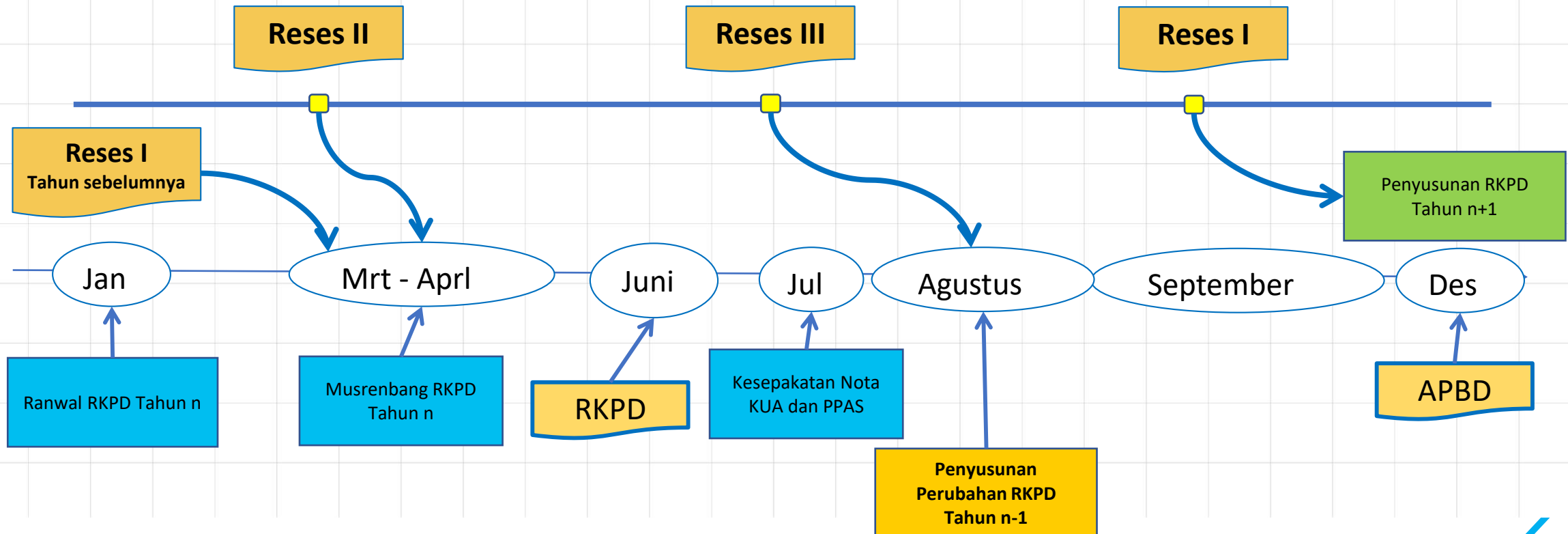
Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.



ATURAN PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN

PASAL 178 Permendagri 86 Tahun 2017 ayat (5) dan (6)

- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.



ALUR PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM SIPD 2023



Akun TAPD Bappeda Provinsi mulai membuka jadwal Perencanaan dan mengisi data RPJMD

01



TAPD Bappeda Provinsi membuat kamus usulan yang merupakan daftar panjang (*long list*) yang dapat dipilih oleh anggota dewan

02



TAPD Bappeda Membuka Jadwal untuk menginput pokok-pokok pikiran

03



17 Maret – 26 Maret

Akun Anggota Dewan menginput pokok-pokok pikiran



04

Akun Setwan memberi rekomendasi terhadap usulan pokok pikiran, bisa menerima, menolak, atau mengembalikan



05



09

Usulan diterima

08



TAPD Bappeda memberikan pertimbangan terakhir, bisa menerima, menolak, atau mengembalikan



07

PD Provinsi melakukan verifikasi, dan memberikan rekomendasi terhadap usulan pokok pikiran, bisa menerima, menolak, dan mengembalikan

06



Mitra PD Bappeda Provinsi melakukan verifikasi dan validasi usulan pokok pikiran, bisa menerima, menolak atau mengembalikan

Ket :  Diterima/diteruskan
 Ditolak/dikembalikan





04 PENUTUP





TERIMA KASIH

"Sukses Perencanaan Sukses Implementasi"

Jalan Ir. H. Juanda No.287, Dago, Coblong,
Kota Bandung, Jawa Barat | 40135

Telp : (022) 25 16065 | Fax (022) 2510731
Email : public@bappeda.jabarprov.go.id

 Bappeda Jabar  [bappedajabar](https://twitter.com/bappedajabar)  [bappedajabar](https://www.instagram.com/bappedajabar)  Bappeda Provinsi Jawa Barat

bappeda.jabarprov.go.id